

PENGERTIAN POLITIK, KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN SERTA RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

¹Ninik Sugiyarti, ²Lili Indriyani, ³Masduki Duryat

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon

¹ niniksugiyarti064@gmail.com, ²liliindriyani785@gmail.com, ³masduki@uinssc.ac.id

Abstrak

Tulisan ini memaparkan terkait pengertian politik, kebijakan, dan ruang lingkup pendidikan. Kebijakan ikut serta dalam menentukan bagaimana pengembangan Pendidikan sangat berdampak pada system pembelajaran, kurikulum, serta aksesibilitas pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini bersifat deskriptif yaitu mengacu tulisan pakar pendidikan serta teori yang sesuai. Ruang lingkup politik kebijakan pendidikan mencakup yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, termasuk aspek kurikulum, pendanaan, rekrutmen dan pengembangan tenaga pendidik, dan pemerataan akses pendidikan. Kajian ini penting untuk dipahami bagaimana keputusan yang strategis di bidang pendidikan dibuat dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan serta kualitas pendidikan. Dengan memahami politik kebijakan pendidikan secara komprehensif, diharapkan dapat mendorong partisipasi kritis masyarakat dalam mengawal arah pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan gambaran singkat terkait pengertian politik, Kebijakan serta Ruang Lingkup Pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, politik

Abstract

This paper explains the concept of politics, policy, and scope of education. Policy plays a role in determining how education development has a significant impact on the learning system, curriculum, and accessibility of education. The approach used in this paper is descriptive, referring to the writings of education experts and appropriate theories. The scope of education policy politics includes: planning, implementation, and evaluation of policies, including aspects of curriculum, funding, recruitment and development of educators, and equal access to education. This study is important to understand how strategic decisions in the field of education are made and how they have implications for justice and the quality of education. By understanding education policy politics comprehensively, it is hoped that it can encourage critical participation of the community in overseeing the direction of sustainable education development. This paper is expected to provide a brief overview of the concept of politics, policy and scope of education.

Keywords: Policy, Education, Politics



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas karena biasanya pengetahuan manusia dapat dilihat dari seberapa tinggi seorang dalam menempuh Pendidikan. Dengan disediakannya Pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara. (analisis kebijakan Pendidikan dalam perspektif madrasah_wahyu Iskandar 2019). Tujuan Pendidikan yang tercantum dalam pembukaan undang-undang memberikan makna yang terus berkembang sepanjang masa, dan kebijakan Pendidikan Indonesia merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan serta mengatur agar kualitas Pendidikan di Indonesia lebih baik. (Daud, 2024).

Dalam menentukan arah dan mutu pendidikan di suatu negara, seperti Indonesia, politik dan kebijakan pendidikan merupakan dua faktor yang saling terkait erat. Kebijakan pendidikan Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan zaman untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan global yang muncul. Kualitas dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. (Arifianto, 2020)

Di Indonesia, kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. Proses pembuatan kebijakan pendidikan ini bukan hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Analisis kebijakan pendidikan sangat penting dalam hal ini untuk memahami efek dari kebijakan yang diterapkan dan hasil yang dicapai di lapangan (Ginting & Mulyana, 2018).

Istilah kebijakan adalah salah satu yang akrab dengan semua orang, terutama mereka yang notabene ada di bisnis, organisasi, dan pendidikan tinggi. Banyak ahli dan cendekiawan juga menyajikan temuan pemikiran terkait kebijakan mereka, seperti yang dinyatakan oleh Koontz, Harold, dan Cyril O'Donnell (1984), yang menyatakan bahwa kebijakan ialah deklarasi atau pemahaman umum untuk mengarahkan pemikiran dalam pengambilan keputusan yang memiliki esensi keterbatasan tertentu.

Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti pendanaan pendidikan, kurikulum, akses pendidikan, dan kualitas pengajaran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti program pendidikan inklusif, reforma kurikulum, hingga peningkatan pelatihan bagi para pendidik. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini tetap ada, mulai dari keterbatasan anggaran, ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, hingga kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pendidikan yang ada, agar dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Menurut Pembukaan Konstitusi 1945, Kebijakan Pendidikan berfungsi sebagai kerangka hukum yang memungkinkan semua penyelenggara pendidikan untuk mengambil bagian dalam mendidik masyarakat. Ini juga bertindak sebagai dasar untuk menyediakan panduan dan kejelasan kepada penyedia pendidikan yang harus mereka ikuti.

Metode

Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kualitatif atau tinjauan literatur. Mengklasifikasikan data sastra dari buku, publikasi ilmiah, dan jurnal lainnya adalah bagaimana prosedur pengumpulan data dilakukan. Membaca, mencatat, dan mengolah data adalah langkah-langkah yang terlibat dalam presentasi ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan sebuah penggambaran terkait sistematis mengenai karakteristik sesuai fakta yang berada pada lapangan serta objek pembahasan yang terkait. Sehingga, peneliti berusaha untuk menyusun informasi singkat kebijakan politik, serta ruang lingkup kebijakan Pendidikan

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Politik

Politik adalah fenomena yang melibatkan orang-orang yang terus-menerus menjadi bagian dari masyarakat. Ini adalah organisme sosial pada dasarnya, selalu berkembang dan hidup secara dinamis. Karena itu, politik selalu menjadi gejala yang dialami orang selama tahap perkembangan mereka. Akibatnya, kata "politics", yang berasal dari kata bahasa Inggris "*politic*", memperlihatkan sifat atau tindakan manusiawi. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang setara dengan kata bahasa Inggris.

Kemudian, kata itu diadopsi oleh orang Romawi, yang juga menambahkan ilmu negara. Politik, menurut KBBI, adalah ilmu konstitusi, termasuk landasan dan struktur pemerintahan. Dalam bahasa Indonesia, istilah "politik" telah berkembang menjadi arti tiga hal yang berbeda (WJS Poerwadarminta, 183: 763): "semua urusan dan tindakan/kebijakan, strategi, dll.) mengenai pemerintahan satu negara terhadap negara lain, tipu daya atau ketidakadilan, dan juga digunakan sebagai nama untuk disiplin ilmu "ilmu, yaitu ilmu politik".

Politik Pendidikan merujuk pada kebijakan, strategi, dan praktik yang terkait dengan Pendidikan yang terkait dengan Pendidikan di suatu negara atau system Pendidikan. Hal ini mencakup keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah atau Lembaga politik lainnya untuk membentuk dan mengatur system Pendidikan. (Fernando & Sirozi, 2024)

Beberapa ahli memberikan definisi politik, sebagai berikut (Syafudin, 2018) :

1. Melihat definisi ini, Pengertian politik kemudian menunjukkan perilaku manusia, baik itu dalam bentuk tindakan, sikap, atau kegiatan, yang semuanya secara alami ingin menggunakan kekuasaan untuk menjaga atau mempengaruhi tatanan kelompok komunal. Meskipun harus diakui bahwa kekuasaan dan politik terkait erat, kekuasaan sebenarnya diperlukan agar politik berfungsi dan kebijaksanaan meresap ke dalam kehidupan masyarakat.
2. "Secara umum bahwa politik adalah wadah yang memiliki berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang melibatkan proses penentuan tujuan sistem tersebut dan mengimplementasikan tujuan tersebut," tulis Miriam Budi (1982: 8).
3. Secara teori, definisi Deliar Noer dan Miriam Budiardjo serupa karena keduanya memandang politik sebagai kegiatan, tetapi mereka tidak sepakat dalam jenis tindakan yang dilakukan.
4. Deliar Noer mendefinisikan bahwa Pengertian politik tidak hanya dilihat dari sudut pandang perilaku, tetapi juga dilihat dari perspektif sejarah negara

Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga sesudahnya, di mana memiliki konsep yang luas.

Deliar Noer menyimpulkan bahwa politik mencakup kegiatan yang berusaha mengubah struktur sosial, seperti pengalihan kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lain, dan bukan hanya tentang "pengambilan keputusan" dan politik publik, yang menjadi inti dari konsep Miriam Budiardjo.

Perbedaan menjadi lebih jelas jika masalah ini terhubung dengan definisi yang diambil dari Soltou, yang menurutnya politik terbatas pada penanganan negara dan masyarakat atas isu-isu luas. Institusi yang biasanya disebut sebagai negara terkait dengan politik.

Sehingga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Politik adalah cara dan proses dalam membuat keputusan bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks negara, politik berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan, kebijakan dibuat, dan bagaimana masyarakat diatur.

b. Pengertian Kebijakan

Seperangkat ide dan sila yang dikenal sebagai kebijakan berfungsi sebagai dasar dan aturan untuk strategi yang berkaitan dengan pekerjaan, kepemimpinan, dan perilaku. Pemerintah, entitas sektor komersial, dan individu semuanya dapat disebut dengan frasa ini. Peraturan perundang-undangan tidak sama dengan kebijakan. Kebijakan hanyalah saran tindakan yang kemungkinan akan menghasilkan hasil yang diinginkan jika undang-undang memiliki kekuatan untuk menegakkan atau melarang suatu perilaku (misalnya, undang-undang yang memaksa pembayaran pajak penghasilan). Tinjauan kebijakan adalah istilah lain untuk proses pengembangan kebijakan organisasi yang penting, seperti menentukan opsi seperti prioritas program atau pengeluaran dan memilihnya sesuai dengan dampak. Kebijakan juga dapat dipandang sebagai instrumen politik, keuangan, manajerial, atau administrasi.

Beberapa definisi Kebijakan menurut para ahli:

- a. Monahan dan Hengst, kebijakan adalah di mana semua cabang pemerintahan diperintahkan untuk mengawasi operasi sebagai kebijakan. Dalam hal ini, konsep organisasi organisasi menjadi fokus kebijakan, yaitu pola formal yang sama-sama disetujui oleh pemerintah atau lembaga untuk mencoba mencapai tujuannya.
- b. Noeng Muhadjir, (1993: 15) kebijakan ialah upaya membantu untuk meminimalisir persoalan sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dipilih terdapat empat persyaratan harus dipenuhi oleh kebijakan tersebut: (1) standar hidup masyarakat dinaikkan; (2) keadilan ditetapkan oleh hukum, keadilan sosial, dan peluang untuk kesuksesan dan penciptaan pribadi; (3) ada peluang untuk partisipasi masyarakat aktif (dalam pemecahan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi); dan (4) pembangunan berkelanjutan terjamin.
- c. Thomas R. Dye: Seperti ungkapannya, "gagasan yang diusungkan oleh pemerintah yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan," ini mencakup keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan dan kelambanan.

Dapat disimpulkan Dari beberapa definisi di atas bahwa Kebijakan adalah aturan, keputusan, atau pedoman yang dibuat untuk mengatur suatu tindakan atau kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan bisa dibuat oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mengatasi masalah atau mengatur suatu sistem.

c. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah mengembangkan lingkungan dan proses belajar dan memberdayakan semaksimal untuk secara aktif mengembangkan potensi siswa agar tujuan pendidikan ini sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Upaya Memiliki kekuatan agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral yang tinggi, dan kemampuan yang diperlukan untuk masyarakat, dan negara.

Cara lain untuk berpikir tentang pendidikan adalah sebagai kegiatan pengumpulan pengetahuan dan pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran. Orang-orang tumbuh dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan sebagai hasil dari upaya yang disengaja ini, memungkinkan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan orang untuk memperoleh nilai, sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang meningkatkan kehidupan (Tilaar, 2002). Pendidikan juga didefinisikan upaya terarah dan terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk secara aktif meningkatkan potensi mereka sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan berlangsung tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di keluarga dan masyarakat untuk membangun kecerdasan dan karakter negara (Sudjana, 2004)

Berikut beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli:

1. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan, menurut tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, adalah "pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berakhlak mulia, berakal budi pekerti, dan jasmani yang dipimpin oleh kemauan yang luhur." Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang membantu anak-anak tumbuh dan berkembang sebaik mungkin berdasarkan kemampuan dan potensi mereka. Pendidikan berfungsi sebagai peta jalan bagi perkembangan anak-anak, yang bertujuan untuk memaksimalkan keselamatan dan kebahagiaan mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat (Dewantara, 1947).

2. John Dewey

John Dewey, seorang filsuf dan ahli pendidikan asal Amerika, mengemukakan bahwa pendidikan adalah "proses yang berkesinambungan, yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan serta menyelesaikan masalah." Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pendidikan, serta hubungan antara teori dan praktik.

3. Paulo Freire

Pendidikan adalah suatu proses pembebasan, di mana peserta didik harus didorong untuk berpikir kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya agar mampu melakukan perubahan.

4. Herbert Spencer

Herbert Spencer, seorang filsuf dan ahli pendidikan asal Inggris, mendefinisikan pendidikan sebagai "proses untuk mempersiapkan individu agar dapat hidup dengan baik dalam masyarakat." Menurut Spencer, pendidikan harus

mengajarkan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan untuk bertahan hidup.

Sederhananya, pendidikan adalah upaya manusia untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi intrinsik seseorang—baik spiritual maupun fisik—sesuai dengan standar budaya dan masyarakat. Pendidikan menurut para ahli mencakup berbagai aspek penting, dari perkembangan kognitif, sosial, hingga pengembangan karakter dan kemampuan untuk beradaptasi dalam masyarakat. Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian yang baik, mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan siap untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial.

d. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan

Istilah "kebijakan" memiliki arti yang bervariasi di setiap negara. Ini menunjukkan seperangkat aturan dalam bahasa Inggris. Ini berkaitan dengan bahasa dan politik dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Yunani berarti sesuatu dan arti "kota" dalam bahasa Sanskerta. Kebijakan adalah proposal yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin ada tantangan atau peluang dalam menerapkan suatu kebijakan (Nur Widiatul Jannah, Fitri Jannah, Riyan Adri, 2024).

Kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pendidikan dalam suatu negara atau wilayah. Kebijakan ini berfungsi untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengarahkan proses pendidikan supaya dapat mencapai tujuan yang telah disepakati, baik untuk perkembangan individu, masyarakat, maupun negara. Ruang lingkup kebijakan pendidikan sangat luas dan melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek struktural, kurikulum, hingga pendanaan yang bertujuan untuk tercapai secara efektif dan efisien.

Secara umum, ruang lingkup kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, termasuk kurikulum, pendanaan, pengelolaan institusi pendidikan, aksesibilitas, penggunaan teknologi, kesejahteraan tenaga pendidik, serta sistem evaluasi pendidikan. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing aspek tersebut:

1. Kurikulum dan Standar Pendidikan

Salah satu aspek penting dalam kebijakan pendidikan adalah penyusunan kurikulum. Kebijakan ini menetapkan standar dan konten pembelajaran yang harus diikuti oleh setiap lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan inti dari kebijakan pendidikan karena berisi pelajaran pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan kurikulum untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengetahuan yang merata dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dunia kerja (Hasibuan et al., 2023).

Kurikulum harus dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan pemahaman budaya mereka sekaligus membantu mereka mengembangkan karakter, kepribadian, dan pengetahuan dasar mereka. Purwaningsih mengutip Muhammad Busro dan Iskandar yang mengatakan

bahwa perencanaan harus masuk akal, dapat dilakukan, dan dapat diterima. (Busro & Iskandar, 2017).

Kurikulum menjadi salah satu aspek utama dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum yang diterapkan harus relevan dengan kebutuhan zaman serta mampu membentuk kompetensi akademik dan karakter peserta didik (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Permendikbud, 2016).

Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan di Indonesia menekankan fleksibilitas dalam pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2022).

Beberapa aspek penting dalam kebijakan kurikulum meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL): Menetapkan capaian pembelajaran yang harus dikuasai siswa setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seorang dalam hal bertindak, bersikap, dan berpikir yang bersifat konsisten dan merupakan bentuk dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. SKL bagian dari kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan sebagai hasil dari kegiatan belajar siswa (Dewi et al., 2020).
- b. Struktur Kurikulum: Mengatur mata pelajaran wajib dan pilihan yang diajarkan di sekolah
- c. Metode Pembelajaran: Menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perkembangan psikologi anak dan kemajuan teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek, blended learning, dan model pembelajaran diferensiasi.
- d. Evaluasi dan Penilaian: Mengubah sistem ujian nasional menjadi Asesmen Nasional yang lebih menitikberatkan pada literasi, numerasi, dan karakter.
- e. Kebijakan kurikulum juga harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan global. Contohnya, Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid.
- f. Kebijakan kurikulum juga harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan global. Contohnya, Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid.
- g. Kebijakan kurikulum juga harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan global. Contohnya, Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid.

2. Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam kebijakan pendidikan karena menentukan kualitas sarana, prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Namun, masih banyak sekolah yang mengalami kendala dalam pengelolaan dana, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil (Syafudin, 2018).

Kebijakan pendanaan meliputi berbagai aspek berikut:

- a. Alokasi Dana Pendidikan: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk membiayai operasional sekolah, pengadaan fasilitas, dan program peningkatan mutu pendidikan.
- b. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS): BOS adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan, terutama bagi sekolah negeri dan sekolah swasta yang membutuhkan subsidi.
- c. Beasiswa dan Bantuan Finansial: Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu siswa dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa bersekolah tanpa kendala biaya.
- d. Pendanaan Pendidikan Tinggi: Selain alokasi dana untuk sekolah dasar dan menengah, kebijakan juga mencakup skema pendanaan untuk perguruan tinggi, seperti beasiswa LPDP dan bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Kebijakan pendanaan pendidikan harus dirancang secara transparan dan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen pendidikan tanpa adanya penyimpangan.

3. Pengelolaan dan Administrasi Pendidikan

Manajemen pendidikan yang baik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Otonomi pendidikan yang diberikan kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2012). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan pendidikan melibatkan berbagai aspek manajerial yang memastikan jalannya sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Kebijakan ini mencakup:

- a. Desentralisasi Pendidikan: Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan adanya otonomi pendidikan, diharapkan sekolah dapat lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan dan inovasi.
- b. Tata Kelola Sekolah: Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin manajerial yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengelola anggaran pendidikan dengan baik.
- c. Administrasi Berbasis Teknologi: Digitalisasi administrasi pendidikan, seperti sistem data pokok pendidikan (Dapodik), membantu sekolah dalam menyusun perencanaan berbasis data secara lebih akurat.
- d. Efisiensi dalam pengelolaan pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta kesejahteraan tenaga pendidik dan peserta didik.

4. Akses dan Kesetaraan Pendidikan

Pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan berkebutuhan khusus (Permendikbud No. 70 Tahun 2009). Tantangan dalam kebijakan pendidikan inklusif adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus (Suharto, 2015). Salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan adalah memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap

pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Beberapa langkah yang dilakukan dalam kebijakan akses dan kesetaraan pendidikan meliputi:

- a. Program Wajib Belajar 12 Tahun: Pemerintah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat.
- b. Pendidikan Inklusif: Sekolah inklusi disediakan bagi siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama siswa reguler dengan dukungan fasilitas dan metode pembelajaran yang sesuai (Suharto, 2015).

5. Teknologi dalam Pendidikan

Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menawarkan instruksi. Dalam pendidikan, teknologi berfungsi sebagai jembatan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan bidang pendidikan, baik untuk memperluas pengetahuan.(Maritsa et al., 2021).

Perkembangan teknologi memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan harus mampu mengakomodasi pemanfaatan teknologi secara optimal. Beberapa kebijakan terkait teknologi dalam pendidikan antara lain:

- a. Pengembangan e-Learning: Pemerintah menyediakan platform pembelajaran digital seperti Rumah Belajar yang dapat diakses oleh siswa dan guru secara gratis.
- b. Distribusi Perangkat Teknologi: Program Digitalisasi Sekolah bertujuan untuk mendistribusikan komputer, tablet, dan akses internet ke sekolah-sekolah di daerah terpencil.
- c. Pelatihan Guru dalam Teknologi Pendidikan: Peningkatan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran daring maupun blended learning.

6. Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Guru dan tenaga kependidikan merupakan aktor utama dalam keberhasilan pendidikan. Kebijakan terkait tenaga pendidik mencakup peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta sertifikasi guru (Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan menjadi strategi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan (Sudjana, 2004) Tenaga pendidik, khususnya guru, merupakan elemen utama dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memastikan kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Dalam pembangunan suatu negara, politik, kebijakan, dan pendidikan merupakan ide-ide yang saling terkait. Sementara kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang berupaya mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik berfungsi sebagai alat untuk membuat keputusan dalam pemerintahan. Karena pendidikan memengaruhi mutu sumber daya manusia suatu negara, pendidikan merupakan bidang penting dari kebijakan publik. Mengenai kebijakan pendidikan, pemerintah bertugas membuat dan menegakkan sejumlah undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum dan standar pendidikan, keuangan, administrasi sekolah, pemerataan dan akses, penggunaan teknologi, kesejahteraan guru, penilaian, dan

akreditasi hanyalah beberapa topik penting yang termasuk dalam lingkup kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang kompeten harus mampu menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu. Lebih jauh, strategi ini harus cukup fleksibel untuk berubah seiring perkembangan zaman, terutama untuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi sarana utama untuk membangun masyarakat yang kompetitif, cerdas, dan bermoral. Oleh karena itu, untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan pendidikan yang efektif, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting. Dengan kebijakan pendidikan yang tepat, diharapkan sistem pendidikan dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto. (2020). *Politik Pendidikan di Indonesia Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Busro, M., & Iskandar. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Media Akademi.
- Daud, Y. M. (2024). Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia: A Systematic Literature Review. *Intelektualita*, 13(1), 115–131. <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.24871>
- Dewantara, K. H. (1947). *Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Dewi, M. P., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2024). Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10994–11000. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.2314>
- Gintiing, & Mulyana. (2018). *Pendidikan dan Politik: Pengaruh Kebijakan Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia*. Kompas.
- Hasibuan, R. H., Dwiningsih, A., & Annisa, A. (2023). Pelatihan Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) Berbasis Kurikulum Merdeka Pada Guru Paud Se - Kota Medan. *Altafani*, 2(2), 228–237. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i2.186>
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kurikulum Merdeka Konsep Dan Implementasi (2022).
- Maritsa, A., Hanifah Salsabila, U., Wafiq, M., Rahma Anindya, P., & Azhar Ma’shum, M. (2021). Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91–100. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303>
- Nur Widiatul Jannah, Fitri Jannah, Riyan Adri, R. A. (2024). Konsep Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Sudjana. (2004). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru Algensindo.
- Suharto. (2015). *Pendidikan Inklusif di Indonesia : Konsep dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Syafrudin. (2018). *Pendanaan Pendidikan di Indonesia : Analisis dan evaluasi*. Raja Grafindo Indonesia.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (2005).

